



- Urusan Pemerintahan Dinas : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Kegiatan : **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub Kegiatan : **Administrasi Keuangan**
Tipe Sub Kegiatan : **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**
: **Rutin**
- Dukungan terhadap Indikator Program : Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Sasaran : Penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- Output Kegiatan
1. Satuan : Kegiatan
2. Lokasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Latar Belakang kondisi existing (lihat KAK) : Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
- Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah Badan publik membutuhkan penyajian Laporan

Pertanggungjawaban APBD tahun berjalan.

Gambaran Kesenjangan (permasalahan) : -

Lingkup Kegiatan (KAK) :

- a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
 - Menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berjalan berupa laporan keuangan.
 - Mendukung penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
- b. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
 - Belanja Langsung (desk, perjalanan dinas)
- c. Kebutuhan Waktu : 12 bulan
- d. Siapa yang terlibat : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

- 1. Kebutuhan Belanja Pegawai : -
- 2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 3. Koordinasi : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 4. Tinjauan Lapangan : -

Keluaran/ Output : Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

Hasil/ Outcome : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

Kebutuhan Belanja Modal :


- 1. Kebutuhan / dukungan alat / barang : -
- 2. Pengadaan tanah / lahan : -

Anggaran : Tahun 2022 : Rp. 50.000.000

Rincian kegiatan dan tahapan pelaksanaan : Setiap Bulan (12 Bulan)

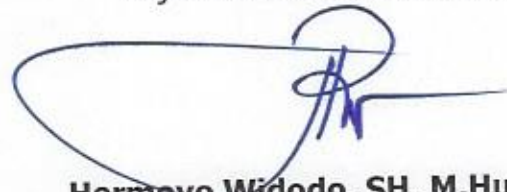
Semarang, 31 Desember 2021

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Genuk Endang Sumiwi, S.IP.,MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19660807 198511 2 001

Diketahui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



Hermoyo Widodo, SH, M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19651021 199403 1 006